

matajendela

SENI BUDAYA YOGYAKARTA

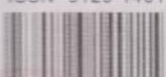
Volume VIII Nomor 3/2013



**Lakon Keistimewaan
Belum Tancep Kayon**

Keistimewaan dan
Tantangan Daya Kreasi
Kawula Dalem

ISSN 0126-1401



9 770126 140119



Diterbitkan oleh Taman Budaya Yogyakarta
Jl. Sriwedani No. 1 Yogyakarta 55123
Telp: (0274) 523512, 561914 Fax: (0274) 580771
Email: matajendela@yahoo.com
Website: www.thewindowofyogyakarta.com



Ilustrasi Cover: Prajurit Keraton Yogyakarta
Foto: Hartono Karnadi

Penanggungjawab
GBPH Yudhaningrat
Diah Tutuko Suryandaru

Pimpinan Umum
Dyan Anggraini Rais

Manajer Produksi
Siswati

Pemimpin Redaksi
Kuss Indarto

Dewan Redaksi
Landung Simatupang
Suwarno Wisetrotomo
Lephen Purwaraharja
Satmoko Budi Santosa
Angelina Prihaksiwi

Sekretaris
Munika Utun Wijayati

Artistik
Hartono Karnadi

Fotografi
Suprayitno Rudi Subagyo

Distribusi
Dian Widowati Lestari

matajendela

SENI BUDAYA YOGYAKARTA

Volume VIII Nomor 3/2013

JENDELA

- Lakon Keistimewaan Belum *Tancep Kayon* 4
- Keistimewaan versus Kemiskinan
Daya Kreasi Kawula Dalem 8
- Keistimewaan DIY
Dalam Pusaran Opini 17

LINTAS

- Catatan Singkat Festival Tokyo 2012
Eksplorasi ke Arah Post-Realisme 20

SKETSA

- Sajak Sajak Hari Leo AER 32

GAUNG

- Hari Leo AER dan Sastra Yogya 34

RESENSI BUKU

- Posisi Kritis dan 'Birahi' Seorang St. Sunardi 38

Lakon Keistimewaan Belum 'Tancep Kayon'

Foto: Hartono Kurnadi



G Budi Subanar

Bertahun-tahun
wacana Keistimewaan
Yogyakarta dibangun
dan diperjuangkan.
Sejak munculnya
RUUK, dan terus
berlanjut.
Suasananya
tegang.

Ketegangannya, ada tarik ulur antara suara dari daerah (yang di bawah), berhadapan dengan rencana kebijakan pemerintah pusat yang menghendaki adanya pemilihan untuk kepala daerahnya. ALASANNYA, inilah wujud "pembaruan demokrasi sesuai amanat reformasi". (Padahal, sebenarnya reformasi juga sudah dibajak.) Tidak kurang, suara ekstrim yang pernah dikemukakan Presiden SBY, "Monarki itu adanya dalam ketoprak".

Tidak bisa langsung *manyuro*

Dinamika tarik ulur ini menarik. Kalau dari pusat, iramanya seakan sudah langsung *manyuro*, dari Yogyakarta iramanya masih tetap sesuai pakem pedalangan. Mulai dari *pathet nem*, *pathet sanga*, baru *manyuro*. Ini tercermin dalam kisahnya. Dalam suasana ketegangan itu, berbagai pihak terlibat *cancut tali wondo*. Ada yang bergerak pada tataran wacana dengan merumuskan argumentasi-argumentasi yang

menggunakan akal sehat. Ada massa yang bergerak di lapangan dengan berbagai macam-macam aksi: para dukuh ber satu, memasang berbagai umbul-umbul, membuat paspor ala Yogyakarta, dan berbagai *happening art* lain yang menyuarakan aspirasi rakyat. Termasuk, digelarnya 'Sidang Rakyat' di Gedung DPRD DIY.

Sekarang, akhirnya dikeluarkan UU Keistimewaan yang merumuskan adanya lima pilar keistimewaan. Babak pertama sudah selesai. Berhadapan dengan pemerintah pusat, irama *manyuro* sudah ditabuh, tapi belum sampai *seleh*. Kenapa penonton sudah mau bubar? Padahal sebenarnya lakon keistimewaan belum *tancep kayon*. Hati-hati, nanti lakonnya jalan sendiri. Tatkala UUK sudah disahkan, sekarang Pemda (Pemerintah Provinsi dan DPRD) sibuk merumuskan turunannya dalam Perda Istimewa. Dalam tahap ini, proses yang telah dilalui seakan mau dikubur dan dilupakan.



Hanya orang-orang khusus yang berwenang untuk merumus kebijakan setempat. Apalagi nanti akan berimplikasi pada politik anggaran. Apa penonton mau diajak mengalami *amnesia*? Sakit lupa. Lupa pada wacana yang telah dirumuskan dan diperjuangkan, lupa pada berbagai pihak yang telah turut ambil bagian dengan berbagai macam keprihatinan dan aksinya. Lupa pada keistimewaan yang nyata hadir -digelar dan digulung lewat wacana dan aksi massa yang berkelanjutan- secara semarak, kaya dan penuh nuansa dan berlangsung selama bertahun-tahun. Karena *amnesia*, lalu membiarkan diri dijerat pada perkara yang dibuat-buat, dan serba terbatas.

Keistimewaan penuh nuansa

Wacana dan aksi keistimewaan sangat kaya nuansa, dan saling bertaut. Lebih kaya dari yang dirumuskan. Keistimewaan tidak melulu pada pemerintahannya, bukan melulu pe-

merintah daerah yang merancang dan memutuskan. Keistimewaan bukan program. Apalagi program yang hanya terarah pada satu bidang tertentu. Atau program yang diciptakan untuk menyerap anggaran. Bukan itu. Keistimewaan adalah nafas yang dihidupi terus menerus oleh segenap warga Yogyakarta, dengan seluruh sistem jaringan yang menopang kehidupannya, sekaligus sampai pada tingkat pemaknaannya. Baik yang tinggal di kota, mau pun yang bermukim di perbatasan dengan Pracimantoro (di wilayah timur), sampai mereka yang tinggal di dekat Sungai Bogowonto di ujung barat. Keistimewaan Yogyakarta itu menyebar, merakyat dan menyebar.

Babak baru yang berlangsung saat ini ada pada tingkat lokal di Yogyakarta. Tapi, pagelaran keistimewaan seolah tak lagi berlangsung. Hanya pembicaraan beberapa gelintir orang, dan hanya berkutat pada beberapa hal kecil dalam rumusannya. Padahal ba-

rangkali menyembunyikan agenda lain, menyimpan angka-angka anggaran yang menjadi dana penopang untuk menguatkan keistimewaan yang sudah diperjuangkan dan dihidupi dalam proses yang lama. Logikanya, setelah status legal diperoleh dengan adanya undang-undang, tentunya keistimewaan akan didukung dengan politik anggaran. Siapa akan bermain? Memainkan apa dan secara bagaimana? Kalau yang terjadi serba remang-remang, jangan-jangan akan berlangsung sebuah ujaran "melik nggendhong lali". Karena "Petruk dadi Ratu", akhirnya dia "melik nggendhong lali". Siapa petruk-petruk itu? Dan, 'melik' apa yang digendongnya? Apa sekarang akan diizinkan terjadi episode "Petruk Dadi Ratu"? Mari kita bicara.

Keistimewaan ke luar dan ke dalam

Berbagai argumen keistimewaan dirumuskan untuk menghadapi agenda kebijakan yang digariskan pemerintah

pusat. Ada acuan sosio historis yang menjadi salah satu pertimbangan keistimewaan. Ada pula keistimewaan yang acuannya situasi aktual. Mulai dari yang mengacu pada keistimewaan yang ditempatkan pada asal-usul berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta yang menjadi ibukota Negara RI pada masa balitanya. Keistimewaan karena berbagai lembaga pendidikan yang tersedia dan mengabdikan untuk menyumbang para lulusan yang cerdas guna berkarya di berbagai daerah lain. Keistimewaan karena birokrasinya menduduki angka rendah untuk tingkat korupsi. Keistimewaan karena akseptabilitas yang tinggi untuk penanaman modal luar. Keistimewaan karena penduduknya, biar miskin tapi bisa berumur panjang. Tidak semua keistimewaan yang disebut ini termasuk dalam salah satu dari lima pilar penopang keistimewaan.

Ada acuan sosio historis yang menjadi salah satu pertimbangan keistimewaan. Mencakup berbagai bidang sebagaimana disebut dalam UUK

sebagai pilar-pilar keistimewaan: pemerintahan, tata ruang, kebudayaan. Beberapa hal tersebut merupakan kesatuan integral yang butuh kajian komprehensif. Pemerintahan yang semula berpusat pada Kraton, oleh Sultan Hamengkubuwono IX telah dimodernkan. Dibentuk satuan musyawarah tingkat desa. Artinya ada pembaruan yang menyentuh sampai pada lapis bawah. Ini tata ruang sosial yang dibentuk. Diselenggarakan dengan kepemimpinan yang bermutu dan berorientasi pada masyarakat yang dipimpinnya. Menghidupi dan menyuburkan, serta memperkaya wilayah teritorial Yogyakarta dalam segala aspeknya. Dengan geliatnya, menghadirkan peradaban dengan beragam ekspresi dan pemaknaannya. Sampai menciptakan kondisi yang memungkinkan orang berumur panjang. Untuk orientasi sekarang dan ke depan, bagaimana jaringan lapis bawah di banyak tempat di Yogyakarta ini akan diperkuat dan disuburkan. Sungguh bisa menyentuh sampai seluruh lapis bawah. Kalau yang berlangsung 'melik nggendhong

lali', jangan-jangan jaringan lapis bawah itu akan dilupakan dan ditinggalkan? Kalau bawah mau ditinggalkan, apa yang diperkuat? Siapa yang diperkuat? Apa arti keistimewaan?

Di sinilah tampak bahwa keistimewaan belum *tancep kayon*. Semula dalam berhadapan dengan pemerintah pusat, masyarakat Yogyakarta —baik seniman, pemikir, pendidik, kaum birokrat, pelaku bisnis dan masyarakat umum— berani mengatakan, "Keistimewaan berarti kita memberi andil untuk Indonesia: dari Yogyakarta untuk Indonesia". Itu babak pertama. Sekarang, setelah UUK disahkan apa yang perlu dipikirkan dan dibicarakan tentang keistimewaan. Karena keistimewaan adalah nafas hidup, "Keistimewaan berarti keistimewaan untuk pemberdayaan (ekonomi), dan transformasi (budaya)". Geraknya bukan lagi mengarah keluar. Meyakinkan pihak lain dengan kata-kata, aksi dan tindakan. Sekarang, keistimewaan bukan berarti berbicara keluar, melainkan bertindak ke dalam. Melihat, dan merasa apa yang berlangsung di sekeliling kita.



Menjadi bagian pelaku yang ada di dalamnya. Tidak *ngereh*, menjadi pangreh praja. Tidak (pura-pura) jadi pamong. Melainkan, *manjing ajur ajer* dan terlibat.

Bagaimana kelanjutannya?

Tatangannya saat ini, bagaimana keistimewaan untuk pemberdayaan (ekonomi) dan keistimewaan untuk transformasi (budaya) dicari penalarannya, dibangun argumentasinya, sampai pada perwujudan dan pertanggung jawabannya. Pada pokok-pokok itulah lima pilar keistimewaan ditempatkan. Segenap warga Yogyakarta —seniman, pemikir, pendidik, kaum birokrat, pelaku bisnis, warga masyarakat luas— perlu dilibatkan untuk berpikir dan berdiskusi tentang “Keistimewaan untuk Pemberdayaan, dan Keistimewaan untuk Transformasi”. Bukan untuk dipertanggungjawabkan keluar, melainkan kepada seluruh masyarakat yang turut menghidupi keistimewaan itu. Dalam penggabungan antara ba-

bak pertama dan babak berikutnya, terjadilah dua gerak yang mendinamisir keistimewaan Yogyakarta. Sebagaimana dinamika gerak, ada gaya gerak sentripetal dan gaya gerak sentrifugal. Di satu sisi, gaya gerak akan memusat pada porosnya, gerak ke dalam. Di sisi lain, ada gaya gerak mengarah ke luar. Dalam ketegangan keduanya, terjadilah gerak maju ke depan, atau ke mana pun tergantung ke mana akan diarahkan. Gerak dinamis yang dibangun oleh gerak memusat ke dalam, dan gerak yang berdaya dorong ke luar.

Dalam metafor kedua gaya gerak tersebut dinamika keistimewaan dapat ditempatkan. Yakni gerak yang mendinamisir keistimewaan sebagai Daerah Istimewa yang menyuburkan, memperkaya dan menguatkan masyarakat yang menjadi warga yang tinggal di dalam wilayah Yogyakarta, dan gerak terarah keluar yang memberi sumbangan berharga bagi kehidupan dan peradaban bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia pada umum-

nya. Dengan demikian lakon belum selesai. Setelah babak pertama, lakon keistimewaan belum *tancep kayon*. Lakon terus berlanjut agar keistimewaan tetap menyumbang untuk Indonesia, dari Yogyakarta untuk Indonesia. Sekaligus, gerak yang mendinamisir sumbangan ke dalam, keistimewaan untuk pemberdayaan (ekonomi) dan keistimewaan untuk transformasi (budaya). Demikianlah, keistimewaan Yogyakarta tetap dihidupi, disuburkan, dikaji dan diperkembangkan untuk memperkokoh yang ada pada posisi poros penopangnya, dilengkapi dengan gerakan yang mendorong dan menuntun terarah ke luar, memberi sumbangan kepada pihak lain, Indonesia dan bangsa-bangsa pada umumnya. Semoga demikian ■

G Budi Subanar

Pengajar Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Anggota Dewan Kebudayaan Yogyakarta

